



EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CIPP DI SEKOLAH DASAR KOTA BENGKULU

¹Agus Firnadi
agusvirmadi@gmail.com
Universitas Bengkulu

²Syukri Hamzah
shamzah@unib.ac.id
Universitas Bengkulu

³Hadiwinarto
hadiwin@unib.ac.id
Universitas Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian evaluatif yang menggunakan model evaluasi Context Input Process Product (CIPP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat ketercapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar (SD) di Kota Bengkulu dilihat dari aspek CIPP; mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat ketercapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SD Kota Bengkulu; dan merumuskan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 17 Sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif yang diperoleh melalui teknik random sampling. Data diperoleh melalui pengisian instrumen kuesioner berbasis CIPP dengan partisipan 1 orang kepala sekolah dan 4 orang guru yang mengajar dari masing-masing sekolah. Saran dan rekomendasi juga diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan masing-masing sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pelaksanaan pendidikan inklusif di 17 sekolah sangat bervariasi dengan skor ketercapaian tertinggi adalah 83% skor ketercapaian terendah adalah 22%. Faktor dominan yang mendasari kurangnya skor ketercapaian antara lain kurangnya ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), kurangnya kompetensi dan kualifikasi GPK yang ada, dan kurangnya pemahaman guru-guru reguler terhadap kebutuhan peserta didik khusus. Faktor yang mengikuti selanjutnya adalah keadaan fasilitas dan alat bantu yang minim pada setiap sekolah, bangunan yang belum aksesibel, kekurangan alokasi dana dalam penyelenggaraan, hingga kurang kerjasama dengan pihak luar terkait kebutuhan pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus.

Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan Inklusif, CIPP

Abstract

This research is an evaluative study using the Context Input Process Product (CIPP) evaluation model. The purpose of this study is to describe the level of achievement of implementing inclusive education in elementary schools (SD) in Bengkulu City from the CIPP aspect; knowing the dominant factors that influence the level of achievement in implementing inclusive education at the elementary school level in Bengkulu City; and formulate appropriate recommendations to improve the quality of implementing inclusive education in Bengkulu City Elementary Schools. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. The research sample consisted of 17 elementary schools providing inclusive education which were obtained through a random sampling technique. The data was obtained through filling out the CIPP-based questionnaire instrument with 1 school principal and 4 teachers from each school participating. Suggestions and recommendations were also obtained through Focus Group Discussions (FGD) with representatives from each school. The results showed that the conditions for the implementation of inclusive education in 17 schools varied greatly with the highest achievement score being 83% and the lowest achieving score being 22%. The dominant factors underlying the lack of achievement scores include the lack of availability of Special Guidance Teachers (GPK), the lack of competency and qualifications of existing GPK, and the lack of understanding of regular teachers on the needs of special students. Factors that follow next are the minimal condition of facilities and tools at each school, buildings that are not yet accessible, lack of allocation of funds in implementation, and lack of cooperation with outside parties related to the service needs of students with special needs.

Keyword : Evaluation, Inclusive Education, CIPP



PENDAHULUAN

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai usaha untuk membangun karakter bangsa yang berilmu pengetahuan, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut, tidak lain adalah melalui pendidikan.

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ditekankan pula pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, maka setiap warga negara memiliki kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut mencakup pula warga negara dengan kelainan fisik, emosional, mental, maupun sosial, atau seringkali disebut sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK didefinisikan Hallahan dan Kauffman¹ sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional, di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya. Kekhususan yang ada menjadikan mereka memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna.

Pusdatin Kementerian Kesehatan mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini mencapai 11,580,117 orang, diantaranya

3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis). Sementara World Health Organization (WHO) menyebutkan di Indonesia terdapat sekitar 24 juta orang yang tergolong disabilitas, termasuk orangtua, disabilitas mental dan intelektual. Dari jumlah tersebut menurut Badan Pusat Statistik, baru 40% Penyandang Disabilitas usia sekolah yang bersekolah dan 60% sisanya belum mendapat layanan pendidikan yang optimal.

Yusuf, dkk.² melakukan penelitian analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia, antara lain disebabkan (1) faktor geografis jarak tempat tinggal anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan sekolah luar biasa (SLB), (2) kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berperspektif disabilitas masih rendah, (3) persepsi masyarakat bahwa sekolah bagi penyandang disabilitas hanya di SLB, dan (4) masih banyak sekolah reguler yang belum bersedia menerima siswa dari penyandang disabilitas.

Apabila sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hanya bertumpu pada pendekatan konvensional dengan mengandalkan ketersediaan SLB, dapat dipastikan bahwa akan semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan pendidikan di Indonesia. Diperlukan cara alternatif untuk memenuhi hak pemerolehan pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi ABK dalam pendidikan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan inklusif.

UNESCO (2005) mengartikan pendidikan inklusif sebagai "... a process intended to respond to

¹ Kaufman, R., & Thomas, S. (1980) *Evaluation without fear*. New York: New. Viewpoints

² Yusuf, dkk. 2018. *Pendidikan Inklusif & Perlindungan Anak*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.



student diversity increasing their participation and reducing exclusion within and from education”, yaitu sebuah proses yang dimaksudkan untuk menanggapi keragaman siswa dengan meningkatkan partisipasi mereka dan mengurangi pengecualian dalam bentuk pendidikan. Sementara Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mengartikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Mengacu pada pengertian tersebut, pendidikan inklusif dianggap dapat memperkecil kesenjangan angka partisipasi ABK pada kehidupan normal, mengurangi pengecualian, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan keragaman anak.

Pemerintah Indonesia telah banyak mengamankan sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 dari 1.6 juta jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang mendapatkan layanan pendidikan khusus. 18 persen tersebut, terdapat 115.000 anak bersekolah di SLB dan 299.000 lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusif, dan sebagian besar adalah pada tingkat SD (Sekolah Dasar). Sunaryo³ menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan jumlah seluruh SD yang ada di Indonesia yaitu 144.567 sekolah, jumlah seluruh SD inklusif sebenarnya baru mencapai 0,44%. Keberadaan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang di

dalamnya menegaskan bahwa setiap Pemerintah kabupaten/kota wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD, SMP, maupun SMA pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, diyakini jumlah ABK yang mengenyam pendidikan di sekolah inklusif akan semakin meningkat.

Kota Bengkulu sendiri adalah salah satu kota yang mencanangkan diri sebagai kota inklusif sejak tahun 2013. Setelah disahkannya Peraturan Walikota No. 25a Tahun 2014 tentang Pendidikan Inklusif, saat ini setiap kecamatan di Kota Bengkulu memiliki sekurang-kurangnya 1 SD inklusif dan 1 SMP inklusif dengan rincian jumlah 19 sekolah pada tingkat dasar (SD), 9 sekolah tingkat menengah pertama (SMP), dan 4 sekolah tingkat menengah atas/kejuruan (SMA/SMK).

Menyelenggarakan pendidikan inklusif membutuhkan banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan dimodifikasi demi memenuhi akomodasi yang dibutuhkan peserta didik. Hal-hal tersebut misalnya mencakup legalitas sekolah penyelenggara inklusif, modifikasi acuan kurikulum yang akan diajarkan pada peserta didik, modifikasi proses pembelajaran dan pengelolaan kelas inklusif, sistem penilaian dan kenaikan kelas peserta didik berkebutuhan khusus, ketersediaan dan kualifikasi SDM tenaga pengajar di sekolah penyelenggara inklusif, serta ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas yang aksesibel untuk menunjang pembelajaran⁴.

Mengingat pentingnya pendidikan inklusif seperti yang telah dipaparkan di atas, pada kenyataannya masih banyak kendala dalam pengimplementasiannya seperti; kurangnya tenaga pengajar, kurangnya pemahaman pengajar terhadap konsep inklusif itu sendiri, kesulitan pengajar dalam memodifikasi materi karena ketidakpahaman karakteristik peserta didik, atau

³ Sunaryo. (2009). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa). Bandung: PLB FIP UPI

⁴ Yusuf, dkk. 2018. Pendidikan Inklusif & Perlindungan Anak Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.



keterbatasan sekolah dalam menyediakan sarana prasarana yang aksesibel, serta kendala-kendala lain yang membuat sekolah-sekolah tersebut belum memenuhi standar minimum penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini terbukti dari berbagai riset baik di tingkat internasional maupun di Indonesia sendiri. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Buhere dan Ochieng di Kenya yang melibatkan 150 sekolah inklusif, 30 kepala sekolah, 120 guru reguler dan 8 guru khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif belum disertai dengan struktur pendukung yang memadai; pendidik tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, sumber daya belajar yang tersedia tidak memadai dan tidak pantas⁵.

Penelitian terhadap 72 guru sekolah reguler yang dilaksanakan di Serbia oleh Kalyva dkk. pada tahun 2007 mendapatkan kesimpulan bahwa guru-guru di sekolah reguler lebih bersikap negatif dibanding dengan guru-guru yang telah berpengalaman dalam menangani anak SEN (Special Educational Needs) dalam memandang pendidikan inklusif⁶ (Yusuf, dkk., 2018). Temuan ini mengingatkan pentingnya sosialisasi dan/atau pelatihan khusus bagi guru agar pendidikan inklusif dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut juga didukung oleh hasil survey yang dilakukan González-Gil, dkk. yang menyatakan bahwa 200 guru di sekolah inklusif membutuhkan berbagai pelatihan terutama berkaitan dengan isu-isu pengelolaan kelas inklusif dan metodologi pembelajaran.

Permasalahan lain yang juga sering dihadapi guru di sekolah inklusif adalah mengenai modifikasi kurikulum. Penelitian yang dilakukan Fanu di Papua New Guinea pada tahun 2013, memperoleh kesimpulan bahwa kurikulum sekolah

inklusif yang diadopsi dari Negara Barat untuk diterapkan di sekolah inklusif di Papua New Guinea, ternyata direspon negatif oleh para guru. Mereka mengaku merasa kesulitan untuk menerapkan kurikulum yang diimpor dari negara lain. Karena itu dalam penelitian tersebut direkomendasikan agar modifikasi kurikulum di sekolah inklusif mempertimbangkan faktor budaya lokal dan pendekatan partisipatif.

Sementara di Indonesia, data riset yang dilakukan Yusuf, dkk.⁷ menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sekolah inklusif, hampir semua aspek fungsi manajemen baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat ketercapaiannya rendah.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan di masing-masing satu SD Negeri dan SD Swasta penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bengkulu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraannya, kedua sekolah memiliki kendala yang terletak di aspek berbeda. SD Swasta penyelenggara inklusif mengalami kekurangan tenaga pengajar khusus atau GPK dalam waktu yang lama secara signifikan, sementara SD Negeri penyelenggara inklusif kekurangan dalam pembiayaan dan pengadaan fasilitas yang aksesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, banyak kendala-kendala lain yang dapat ditemukan jika dicari lebih detail menggunakan teknik evaluasi yang rinci dan komprehensif.

Berdasarkan masalah di atas, kemudian muncul ketertarikan peneliti untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Kota Bengkulu. Jika ternyata tingkat ketercapaiannya belum sesuai harapan, kemudian perlu diteliti kesenjangan dan faktor penyebab ketidaktercapaian tersebut, untuk kemudian diberi

⁵ Yusuf, dkk. 2018. Pendidikan Inklusif & Perlindungan Anak Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

⁶ Yusuf, dkk 2018.,

⁷ Yusuf, dkk. 2018. Pendidikan Inklusif & Perlindungan Anak Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.



rekomenadasi agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusif sendiri.

Evaluasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan⁸. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif, statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

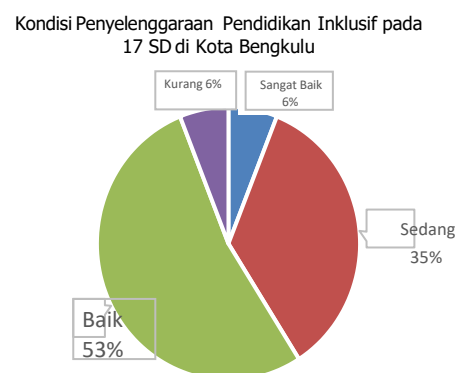
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data diperoleh dari instrumen evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP), dengan pembagian bagian Context, Input, dan Product (CIP) diisi oleh kepala sekolah, dan instrumen penilaian Process (P) diisi oleh 4 guru pada setiap sekolah. Data kemudian direduksi dan secara singkat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Kategori penilaian di atas mengacu pada tabel di bawah ini: Tabel 4.2 Kategori Penilaian

Kategori	Tingkat Ketercapaian
Kurang	0% – 25%
Sedang	26% – 50%
Baik	51% – 75%
Sangat Baik	76% – 100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa capaian skor penyelenggaraan pendidikan inklusif pada setiap sekolah sangat bervariasi. Jika dilihat dari kategori, hanya 1 sekolah (senilai 6%) yang mendapat kategori sangat baik, kemudian 9 dari 17 sekolah (senilai 35%) mendapat kategori baik, 6 dari 17 sekolah (senilai 53%) mendapat kategori sedang, dan 1 sekolah (senilai 6%) sisanya mendapatkan kategori kurang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut dapat kita gambarkan pada pie chart di bawah ini:



bahwa SDN di Kota Bengkulu mendapat persentase capaian skor evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebesar 62% atau dapat dikategorikan Baik. Sumber data dan informasi ini didapatkan dari Kepala Sekolah yang menjabat pada saat itu yakni dan 4 orang guru yang mengajar. Selebihnya kondisi lapangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bengkulu No 93 akan lebih rinci dipaparkan dalam format CIPP di bawah ini:

Context

Pada legalitas penyelenggaraan program, SDN Di Kota Bengkulu mendapat SK resmi penyelenggara program pendidikan inklusif dari Dikpora Kabupaten/Kota. Selain itu pada rumusan visi, misi, dan tujuan yang tertera, tergambar bahwa sekolah ini berkeinginan kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan inklusif.

Input

Hal di atas tergambar dari penyediaan kuota khusus bagi calon peserta didik berkebutuhan

⁸ Arikunto, S. (1993). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara Arikunto, S. dan Cepi, S. (2009). Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis.



husus lebih dari kriteria minimal penerimaan (minimal 1 ABK/rombongan belajar). Kemudian untuk mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus, SDN Di Kota Bengkulu menyediakan guru pembimbing khusus yang jumlahnya cukup dan sebanding dengan peserta didik berkebutuhan khusus yang harus dilayani. Guru pembimbing khusus yang ada juga telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau D- IV, atau dapat disebut telah cukup memenuhi kompetensi pengajar. Walau belum secara sempurna, guru pembimbing khusus menunjukkan kinerja yang positif sesuai dengan yang diharapkan sekolah. Untuk mengimbangnya, sebagian kecil guru reguler yang mengajar di SDN Di Kota Bengkulu juga telah memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan khusus, dan guru-guru ini selalu memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan inklusif karena sekolah secara periodik mengadakan pembinaan dan peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus maupun inklusif bagi para tenaga pendidik dengan mengundang ahli.

Pada penyusunan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, SDN Di Kota Bengkulu melakukan modifikasi pada tingkat SKL (Standar Kompetensi Lulusan), SK – KD/KI (Standar Kompetensi – Kompetensi Dasar/Kompetensi Inti), Silabus, RPP (Rencana Proses Pembelajaran), dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada tiap Mata Pelajaran. Sekolah juga menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) untuk mengakomodasi kebutuhan para peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan. Sebagai pendukung, sekolah juga memiliki program kompensatoris untuk sebagian ketunaan.

Mengenai fasilitas, SDN Di Kota Bengkulu memiliki ruang sumber (kelas khusus) yang dilengkapi dengan peralatan, media dan sumber belajar namun keadaannya kurang memadai. Bangunan sekolah juga telah memiliki sebagian fasilitas yang aksesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus,

contohnya kamar mandi yang dimodifikasi untuk pengguna kursi roda. Tersedia juga sarana pendukung mobilitas peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kelainannya, namun jumlahnya terbatas.

Guna menunjang pembelajaran, sekolah memiliki alat bantu belajar yang telah memadai bagi peserta didik tunagrahita, dan peserta didik lamban/kesulitan belajar. Bagi peserta didik tunanetra, tunadaksa, tunalaras, dan autisme, tersedia pula alat bantu belajar namun kurang memadai. Sedangkan bagi peserta didik tunarungu peserta didik Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI), sekolah tidak memiliki alat bantu belajar sama sekali.

Kemudian untuk menjamin kesehatan peserta didik, SDN Di Kota Bengkulu bekerja sama dengan pihak medis, pihak psikolog, dan pihak terapis untuk menyediakan layanan kesehatan, layanan psikologis, dan/atau bimbingan konseling, dan layanan terapi, secara insidental atau jika diperlukan.

Pada penyelenggaraannya, SDN Di Kota Bengkulu menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program inklusif. Namun, anggaran yang disediakan tidak memadai, karena hanya tersedia dari satu sumber. Meski demikian sekolah tetap proaktif mencari sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program inklusif, walaupun tidak secara optimal.

Process

Pada proses belajar mengajar, sebagian guru di SDN Di Kota Bengkulu telah memodifikasi materi pembelajaran dan menggunakan media dan alat pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk menurunkan target belajar untuk materi tertentu yang tidak mungkin dikuasai peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian mengganti kompetensi tersebut dengan kompetensi lain yang kira-kira memiliki nilai setara. Jika dirasa belum maksimal, sebagian guru juga menyediakan waktu dan tempat khusus untuk memperjelas materi



pembelajaran yang dirasa belum dipahami oleh peserta didik berkebutuhan khusus baik di dalam maupun di luar jam pembelajaran.

Pada pembelajaran di kelas, seluruh guru saling berkolaborasi satu sama lain baik antar sesama guru reguler lain maupun dengan guru pembimbing khusus, dan pada kelas inklusi sebagian dari guru-guru tersebut menerapkan strategi pembelajaran kooperatif dibandingkan pembelajaran kompetitif. Sebagian guru juga melakukan modifikasi dalam penataan kelas untuk meminimalisasi dampak ketunaan yang dimiliki peserta didik.

Ketika masa penilaian, seluruh guru membuat dokumen portofolio perkembangan belajar peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian. Pada tahun ajaran baru, seluruh guru mempertimbangkan tiga kriteria dalam penetapan kenaikan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yakni; (1) Kriteria akademik, (2) Kriteria Kematangan Sosial, dan (3) Kriteria perkembangan usia.

Product

Seluruh peserta didik berkebutuhan khusus lulus dari sekolah dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi dan mendapatkan ijazah yang blangkanya diterbitkan pemerintah. SDN Di Kota Bengkulu selalu merekomendasikan siswa yang telah lulus ke sekolah lanjutan, baik sekolah inklusif maupun SLB karena sebagian besar peserta didik berkebutuhan khusus yang lulus dari sekolah telah memiliki prestasi akademik maupun kompensatoris yang cukup.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini:

1. Hasil penelitian yang bervariasi menunjukkan bahwa dari 17 Sekolah Dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Surakarta, hanya 1 sekolah (senilai 6%) yang mendapat kategori sangat baik, kemudian 9 dari 17

sekolah (senilai 35%) mendapat kategori baik, 6 dari 17 sekolah (senilai 53%) mendapat kategori sedang, dan 1 sekolah sisanya (senilai 6%) mendapat kategori kurang dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal tersebut ditentukan berdasarkan tingkat ketercapaian masing-masing sekolah.

2. Faktor dominan yang menentukan ketercapaian tersebut dan menjadi hambatan-hambatan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif diurutkan sesuai urgensinya yaitu:

- a. Kurangnya penyediaan fasilitas, sarana bantu belajar, maupun sarana bantu mobilitas bagi para peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif
- b. Kurangnya alokasi dana yang dikhususkan sekolah untuk menjalankan program pendidikan inklusif
- c. Kurangnya sosialisasi bagi guru-guru reguler mengenai pengetahuan dasar dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus.
- d. Kurangnya partisipasi/kerjasama antara sekolah dengan pihak luar yang terkait dengan keinklusan seperti layanan medis, layanan terapi, dan layanan psikologi.
- e. Pemerintah kurang memberi dukungan yang berarti pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
- f. Kurangnya kesadaran sekolah perihal pentingnya menyempurnakan pendidikan inklusif
- g. Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang ada belum memenuhi kompetensi dan kualifikasi untuk mengajar peserta didik berkebutuhan khusus.

- h. Sekolahnya tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) atau kekurangan tenaga pengajar.

3. Rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain pengadaan pelatihan atau sosialisasi berupa Kelompok Kerja Guru (KKG), sosialisasi maupun seminar terhadap guru-guru reguler dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang



mengajar pada setiap sekolah, pengadaan alokasi dana tambahan untuk melengkapi sarana prasarana sekolah inklusif, dan mengadakan lebih banyak kerjasama dengan pihak luar dalam mengakomodasi kebutuhan pelayanan medis, terapi, dan psikologi peserta didik berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., Booth, T., & Black-Hawkins, K. Vaughan, M., & Shaw, L., (2000). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol, UK: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE)
- Alkin, D.C. (1969). *Evaluation Theory Development*. Education Comment. New Bury. Dark L.A: Sage
- Arikunto, S. (1993). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, S. dan Cepi, S. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis*. Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara
- Astuti, dkk. (2018). *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013*. Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan ISSN 2338-3372 (print), ISSN 2655-9269 (online)
- Daryanto. (2012). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: DEPDIKNAS
- Effendi, S. (2014). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Fitzpatrick, dan Jody L., dkk. (2004) *Program Evaluation Alternative Approaches and Practical Guidelines*, New York : Pearson Education,
- Guskey, T. R. (2000). *Evaluating Professional Development*. Thousand Oaks. CA: Corwin Press.
- Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2006). *Exceptional Children: An introduction to special education* (10th ed.). Boston: Pearson
- Junanto, S. & Kusna, N. A (2018). *Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusif dengan Model Context, Input, Process, Product (CIPP)*. INKLUSIF : Journal of Disability Studies Vol. V, No 2 Juli – Desember 2018 h. 179 – 194 DOI: 10.14421/ijds.050202
- Kantun, S. (2016). *Penelitian Evaluatif sebagai salah satu Model Penelitian dalam Bidang Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol 10 No 2.
- Kaufman, R., & Thomas, S. (1980) *Evaluation without fear*. New York: New. Viewpoints
- Madaus, G.F., Scriven, M.S., dan Stufflebeam, D. L. (1983) *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing
- Marthan, L. K. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI
- Mehta, S., Bastero-Caballero, R.F., Sun, Y., Zhu,R., Murphy, D.K., Hardas, B. & Koch,G. (2018). *Performance of Intraclass Correlation Coefficient (ICC) as a Reliability Index under Various Distributions in Scale Reliability studies*. Statistics in medicine. 37 (18): 2734-2752.
- Mugiri dan Lestari. (2013). *Instrumen Evaluasi Program Dana BOSS Model CIPP*. Journal of Research and Educational Research Evaluation. Vol 2 No 1.
- Muhajir. (1993). *Analisa Kebijakan Sosial*. Yogyakarta: UGM
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Evaluasi Proses Suatu Program*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta



- Muyasaroh dan Sutrisno (2014). Pengembangan Instrumen Evaluasi CIPP Pada Program Pembelajaran Tahfiz Al-Qur'an Di Pondok Pesantren. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Vol 18, No 2 (2014)
- NKRI. (2014). Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- NKRI. (2013). SK Bupati No. 421.2/256 Tahun 2013 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Inklusif
- NKRI. (2014). Keputusan Bupati No. 425.1/106/02/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggara Pendidikan Inklusif
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Nunnally, & Bernstein, I.H. (1994). *Psychometric Theory*, Edisi ke 3. New York : McGraw Hill
- Owen, J. M. (1993). *Program Evaluasi: Forms and Approaches*. St. Leonards: Allen & Unwin Pty Ltd
- Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional. (2009). *Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif*. Jakarta : DEPDIKNAS
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PPRI
- Purwanto, dkk. (2007). *Pengembangan Modul. Pusat Teknologi Informasi dan. Komunikasi*. Jakarta : DEPDIKNAS
- Provus, M. (1971). *Discrepancy Evaluation for Educational Program Improvement and Assessment*. Barkeley, California: Mc Cutchen Pu. Corp.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Sakni, R. (2008). *Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan*. Palembang : Rafah Press
- Scriven, M. (1967). *The Methodology of Evaluation, dalam Perspective of Curriculum Evaluation*, AERA I (ed.Tyler, R.et.al), Chicago : Rand McNally and Company.
- Stake, R, E. (1967). *The Countenance of Educational Evaluation*. Teachers. College Record.
- Stake, R. E. (1973). 17 PROGRAM EVALUATION, PARTICULARLY RESPONSIVE EVALUATION. (October 1973), 287–288
- Stark, J. S., dan Thomas, A. (1994). *Assessment and Program Evaluation*. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Stubbs, S. (2008). *Inclusive Education: Where there are few resources*. Oslo: Atlasalliance
- Stufflebeam, D. L. & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation, Theory, Models, and Applications: Second Edition*. San Fransisco : Jossey-Bass
- Stufflebeam, D. L., dan Shinkfield, A. J. (1986). *Systematic Evaluation: A Self- Instructional Guide to Theory and Practice*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunaryo. (2009). *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa)*. Bandung: PLB FIP UPI
- Sukandarrumidi. (2004). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Sutikno & Muzayanah. (2011). *Modul kuliah Evaluasi Program*. Jakarta
- Syahril. (2014). *Evaluasi Model CIPP pada Implementasi KTSP Pembelajaran Pendidikan Jasmani*. *Jurnal Sport Pedagogy* Vol. 4. No. 1. April 2014
- Tarmansyah. (2007). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Erlangga
- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.



- UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. France :UNESCO
- Wirawan. (2012). Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakrta : Rajawali Pers.